

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT
(INPRES No. 3 Tahun 2003)**

**PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT LEMBAGA**

VERSI 1.0

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

JL. Medan Merdeka Barat No. 9. Jakarta 10110

Telepon 021- 3855807, Fax:62-21-3855807

website : www.kominfo.go.id

e-mail : info@Kominfo.go.id

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA**



SAMBUTAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government.

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah menyusun pula konsep sistem informasi nasional sebagai acuan/panduan bagi penyusunan national e-Strategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program e-Indonesia, yang didalamnya termasuk pembangunan e-Government

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (*e-Government Development Framework*) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government. Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Pada kesempatan ini saya menyambut baik penerbitan buku "Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga" ini dan diharapkan dapat membantu setiap lembaga pemerintah dalam menyusun rencana induk serta tahapan pengembangan dan penerapan e-Government.

Panduan ini perlu disebarluaskan kepada semua kalangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, serta perlu pula disosialisasikan sebagai bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah dalam pengembangan e-Government guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Task Force e-Government dan semua kalangan yang telah ikut secara aktif dan berpartisipasi dalam menyiapkan buku panduan ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 29 Desember 2003

2

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI



SYAMSUL MU'ARIF

**SAMBUTAN
SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA**

Pengembangan e-government akan melibatkan seluruh faktor yang mempunyai andil dalam menciptakan (menghasilkan) suatu jasa layanan publik. Seluruh faktor tersebut perlu dirancang dari awal melalui proses perencanaan yang matang agar dapat dihasilkan program pengembangan e-government yang dapat diterapkan mulai dari faktor kepemimpinan (Leadership), sumber daya manusia, organisasi dan sistim manajemen, sarana komunikasi, piranti keras, piranti lunak, anggaran (dana) dan lain-lain harus dipadukan ke dalam satu skenario perencanaan terpadu, holistik, bertahap, realistik dan terukur.

Oleh karena itu, Tim Koordinasi Telematika Indonesia menyambut baik diterbitkannya Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dalam menunjang pengembangan e-government. Hal ini sejalan dengan strategi dan program Tim Koordinasi Telematika Indonesia dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dan proses kerja di semua instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah dalam melaksanakan proses transformasi menuju pengembangan e-government.

Panduan ini akan terus disempurnakan, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaannya lebih lanjut sangat diharapkan agar panduan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih luas.

Jakarta, 29 Desember 2003

SEKRETARIS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
selaku
SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA



J.B. KRISTIADI



**MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NOMOR : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003**

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT LEMBAGA**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government, maka perlu menyiapkan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
- b. bahwa untuk efektivitas Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga di dalam menunjang e-Government dipandang perlu adanya Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir b, perlu ditetapkan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dalam menunjang e-Government.

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA**

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 05/SK/MENEG/KI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
7. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan e-Government.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA.

PERTAMA : Menetapkan Panduan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dalam menunjang e-Government yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana induk pengembangan e-Government Lembaga dalam

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA**

menunjang e-Government bagi lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah.

- KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2003

2

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI



SYAMSUL MU'ARIF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Pimpinan LPND, dan;
3. Para Gubernur/Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.

Lampiran
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi

Nomor :
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003

tentang

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PRAKATA

BAB I	KONSEP PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA	1
	1.1 Konsep Pengembangan Infrastruktur e-Government	4
	1.2 Konsep Pengintegrasian Sistem Informasi	6
BAB II	PENERAPAN E-GOVERNMENT LEMBAGA	9
BAB III	PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA	15
	3.1 Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga	17
	3.2 Cetak Biru Pengembangan	18
	3.3 Tahap Pengembangan	19
	3.4 Rencana Implementasi	20
BAB IV	METODOLOGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMBAGA	21
BAB V	PENUTUP	29
LAMPIRAN	PUSTAKA KATA	

PRAKATA

Dokumen ini adalah dokumen yang menjelaskan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk (Rencana Strategis Pengembangan e-Government) Lembaga bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka penerapan e-government untuk menuju *good governance* maka konsep e-Government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Model penerapan e-Government di setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (INPRES No. 3 Tahun 2003).

Model penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan e-Government dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (*e-Government Conceptual Framework*);
- b. Cetak Biru Pengembangan (*e-Government Blue Print*);
- c. Solusi Pentahapan Pengembangan (*e-Government Roadmap*);
- d. Rencana Implementasi (*e-Government Implementation Plan*);

Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga di Instansi Pusat dan Daerah tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan e-Government secara nasional.

Dasar Pelaksanaan :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

- c. Keputusan Presiden RI nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
- d. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework/NITF).
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government.

BAB I

KONSEP PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

KONSEP PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

Konsep pengembangan e-government di setiap lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh :

- tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga;
- jenis informasi sumberdaya;
- jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga.

Hal ini menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan rencana induk e-government di setiap lembaga pemerintah.

Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prioritas pengembangan e-government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Citizen (G2C)*.

Dalam pengembangan e-government lembaga, perlu diperhatikan dan disiapkan aspek kepemimpinan (*e-leadership*), aspek kesadaran akan manfaat e-government

(*awareness building*), aspek sumber daya manusia dan peraturan perundangan yang mendukung.

Seluruh aspek berperan dalam menentukan arsitektur sistem informasi yang akan dibangun (*enterprise architecture*).

1.1 Konsep Pengembangan Infrastruktur e-Government

Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi :

- a. Suprastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (*regulation*).
- b. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
- c. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (*data*

- sharing*), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik.
- d. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (*interface*), dan aplikasi *back office* yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi.

Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru pengembangan e-government di setiap lembaga pemerintah.

Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan e-government. Pengembangan e-government pada setiap lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

1.2 Konsep Pengintegrasian Sistem Informasi

Perlu disadari bahwa setiap lembaga pemerintah memiliki berbagai jenis informasi yang saling terkait. Untuk menuju sistem informasi yang terintegrasi, setiap lembaga pemerintah harus memiliki rencana pengembangan sistem informasi dan pentahapannya.

Pengintegrasian sistem informasi pada suatu lembaga menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai tahap pematangan, pemantapan dan pemanfaatan sebagai langkah lebih lanjut dalam penerapan e-government. Strategi pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan setiap lembaga pemerintah.

Rencana pengintegrasian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut menuju sistem informasi antar lembaga pemerintah.

Konsep pengintegrasian dilakukan dalam 2 tahap :

- a. Pengintegrasian sistem informasi yang ada saat ini melalui antar muka (*interface*) tanpa merubah sistem yang digunakan.
- b. Pengintegrasian sistem informasi kedalam satu kesatuan pada setiap lembaga pemerintah.

BAB II

PENERAPAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

PENERAPAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup:

- a. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
- b. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
- c. kondisi kegiatan layanan saat ini;
- d. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government secara nasional.

Pentahapan dalam penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengikuti:

- **Tingkat Persiapan**, antara lain:
 - a. pembuatan situs web pemerintah (lihat buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah) di setiap lembaga;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government;
 - c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
 - e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (*awareness building*);
 - f. penyiapan peraturan pendukung.

- **Tingkat Pematangan**, antara lain:
 - a. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;

- b. pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

- **Tingkat Pemantapan**, antara lain:
 - a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
 - b. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).

- **Tingkat Pemanfaatan**, antara lain :
 - a. pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Community*) yang terintegrasi;
 - b. pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien;
 - c. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

Penyusunan rencana induk pengembangan e-Government di setiap lembaga meliputi :

- kerangka pemikiran dasar lembaga;
- cetak biru pengembangan;
- tahap pengembangan;
- rencana implementasi.

3.1 Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga

Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan e-government di setiap lembaga pemerintah. Kerangka pemikiran dasar tersebut harus dilandasi oleh layanan utama yang harus diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga yang meliputi:

- a. Konsep e-government lembaga secara menyeluruh.
- b. Analisis terhadap kondisi saat ini.
- c. Strategi pengembangan e-government lembaga.
- d. Pentahapan implementasi e-government.

3.2 Cetak Biru Pengembangan

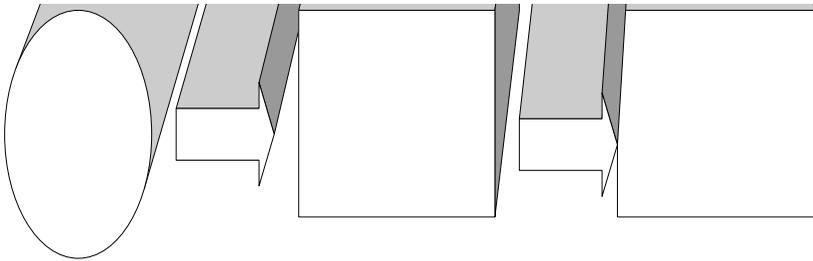
Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Cetak biru dimaksud memuat antara lain:

1. Penjabaran strategi dan rencana strategis e-government.
2. Kondisi layanan saat ini.
3. Infrastruktur saat ini.
4. Masalah dan tantangan.
5. Cetak biru - Infrastruktur aplikasi.
6. Cetak biru - Sumberdaya manusia.
7. Cetak biru - Infrastruktur jaringan.
8. Cetak biru - Infrastruktur informasi.
9. Cetak biru - Integrasi jaringan, informasi dan aplikasi.
10. Cetak biru - Pendanaan.
11. Cetak biru - Struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja.
12. Cetak biru - perawatan (*maintenance*).
13. Peta alur dan tahapan peraturan.
14. Peta alur dan tahapan pengembangan infrastruktur.
15. Peta alur dan tahapan penerapan e-government.

16. Peta alur dan tahapan sistem pendukung.

17. Manajemen perubahan.

Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Alur sistim informasi

3.3 Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan suatu rancangan pengembangan e-government berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru.

Seluruh kegiatan akan menjadi solusi pentahapan pengembangan yang dijabarkan secara rinci kedalam bentuk rencana implementasi.

3.4 Rencana Implementasi

Rencana implementasi e-government mengacu kepada pen-
tahapan pengembangan e-government secara nasional dan
disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga
pemerintah. Jangka waktu penerapan e-government di setiap
lembaga bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada serta
tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government
secara nasional.

BAB IV

METODOLOGI PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

METODOLOGI PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT LEMBAGA

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada kemudahan integrasi dari *reengineering* dan optimalisasi kegiatan. *Reengineering* merupakan suatu perubahan proses bisnis menuju hal yang lebih efektif dan efisien. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai.

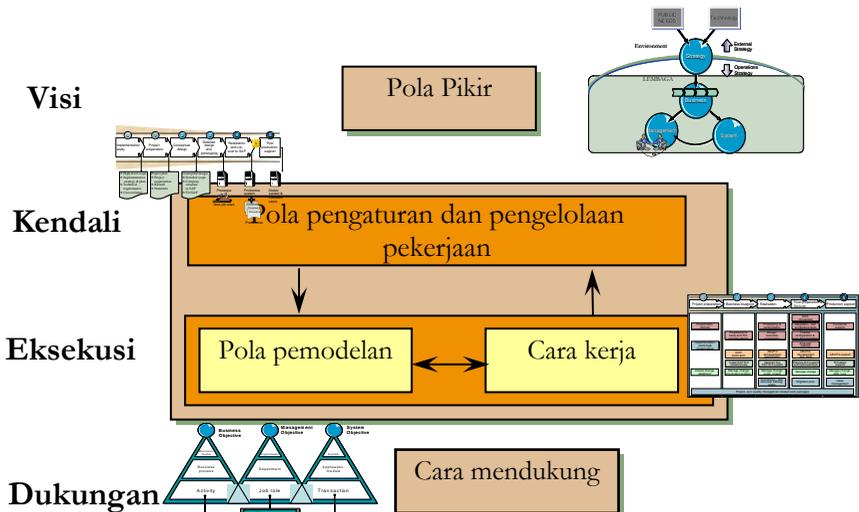
Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal utama yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai;
- b. meningkatkan efisiensi;
- c. meningkatkan produktifitas;
- d. memastikan jangka waktu pencapaian target;
- e. membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah;
- f. membantu kelancaran tahap implementasi.
- g. Mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolok ukur yang digunakan;

Suatu pengembangan mengandung empat unsur utama yaitu:

- Visi
- Kendali
- Eksekusi
- Dukungan

Setiap unsur memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan lainnya untuk menghasilkan satu kegiatan pengembangan yang utuh. Gambaran secara visual ke empat domain tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 2 Domain pengembangan e-Government

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Visi

Visi yang dianut dapat dilihat dari perspektif pengembangan sistem, yang terdiri atas empat hal utama yaitu :

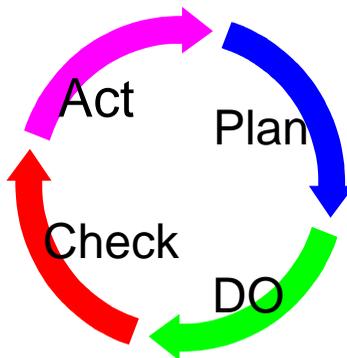
- Strategi
Strategi disusun berdasarkan, kondisi organisasi, masyarakat dan teknologi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan.
- Proses bisnis
Menjelaskan jenis dan prosedur kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Organisasi
Mengacu kepada struktur dari sumber daya manusia yang akan melaksanakan dan mengelola proses bisnis.
- Sistem
Menjelaskan keterkaitan dari seluruh unsur yang mendukung proses bisnis.

b. Kendali

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk memberikan jaminan keberhasilan dari setiap proses bisnis sesuai target yang ditetapkan (*Quality Assurance* - QA). Kegiatan QA ini bersifat:

- lebih dari sekedar verifikasi;
- melebur di dalam proses;
- tindakan setelah pemeriksaan.

Gambar 3 menjelaskan urutan siklus kegiatan QA.



Gambar 3. Siklus Quality Assurance

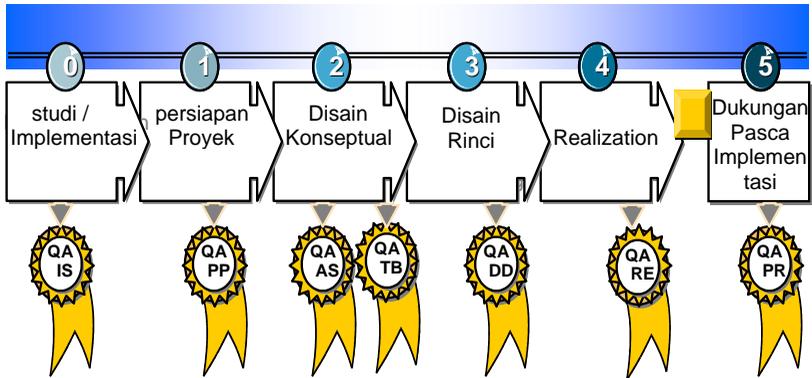
c. Eksekusi

Langkah pelaksanaan dilakukan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam rencana induk pengembangan e-government lembaga. Pelaksanaan kegiatan dengan memasukan QA sebagai syarat kendali mutu harus dijalankan oleh setiap lembaga yang akan menerapkan e-Government.

Langkah pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Studi implementasi.
2. Persiapan proyek.
3. Desain konseptual.
4. Desain rinci & pembuatan *Prototype*.
5. Realisasi.
6. Dukungan setelah implementasi.

Gambaran secara visual dari pentahapan ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Langkah pelaksanaan pengembangan e-Government

d. Dukungan

Dukungan pengembangan e-government terutama menyangkut masalah koordinasi antar lembaga, bahan acuan, kebijakan serta regulasi dan standar pengembangan yang digunakan secara nasional.

BAB V

P E N U T U P

P E N U T U P

Dokumen Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-government di setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan *good governance*.

Dokumen ini adalah versi 1.0 dan akan terus disempurnakan, dilengkapi dan dimutakhirkan serta dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Buku panduan ini dikelola dan direvisi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan dapat dilihat melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan alamat <http://www.kominfo.go.id>

LAMPIRAN

PUSTAKA KATA

Berikut ini adalah daftar Pustaka Kata yang berkaitan atau berhubungan dengan isi keseluruhan dari buku panduan ini.

A

ABA	American Bar Association
ACCESS	Akses (jaringan informasi)
AOL	America Online
APCN	Asia Pacifik Cable Network
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
APPLICATION	Piranti Lunak (system software) terapan
ASP	Application Service Provider
ASYCUDA	Automated System For Custom Data
AUTHENTICATION	Otentik / Keabsahan
AVAILABILITY	Ketersediaan
ATM	Automatic Teller Machine/Async Transfer Mode

B

BACKBONE	Jaringan Utama Sistem Komunikasi
BACK OFFICE	Jaringan Penunjang dlm Pelayanan Informasi
BANDWIDTH	Lebar Pita Frekuensi
BIT	Ukuran Digital
B2B	Business to Business
B2C	Busines to Customer
B2E	Business to Employee

B2G	Business to Government
BIM	Balai Informasi Masyarakat
BOO	Build Own Operate
BOT	Build Own Transfer
BOOT	Build Own Operate Transfer
BRIDGE	Penghubung (perangkat) Jaringan
BROADBAND	Jaringan dengan kapasitas yg luas
BUG	Kutu/ kesalahan Alur Program
BUS	Topologi Jaringan Berbentuk Iringan
BPS	Bit Per Second

C

CA	Certification Authority (penyelenggara)
CARRIER	Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
CAS	Country Assistance Strategy (World Bank)
CEO	Country Executive Officer
CIO	Chief Information Office
CHATTING	Komunikasi Interaktif (computer)
CLOSE USER	Jaringan Komunikasi Khusus dlm 1 Kelompok
CLIENTS	Pengguna/Anggota dlm Jaringan
CONTENTS	Kandungan Informasi/Program
CONNECTIVITY	Ketersambungan
CO-LOCATION	Penempatan jaringan dlm jaringan terpisah
CONTROL ACCESS	Kontrol thd pemakai / pengakses
CPU	Central Processing Unit/Otak Komputer
CTC	Community Teleservice Center (lihat BIM)

D

DATABASE	Data dasar/ Data basis
DIAL-UP	Komunikasi via modem secara langsung
DIGITAL SIGNATURE	Tanda tangan elektronik/ Digital
DIRECTORY	Lokasi/ Tempat file (computer)
DISASTER	Penyerang/ Perusak/ Pendobrak

DNS	Domain Naming System (system nama domain di Internet)
DOWNLOAD	Penerimaan dari computer host/Server
DP	Digital Product
DRS	Disarter Recovery System

E

E-BILLING	Penagihan secara elektronik
E-COMMERCE	Perniagaan secara elektronik
E-GOVERNMENT	Kepemerintahan secara elektronik
EIS	Sistem Informasi Eksekutif
E-PROCUREMENT	Pengadaan secara elektronik
EDI	Electronic Data Interchange
EFT	Electronic Fund Transfer
E-MAIL	Surat Elektronik
ENABLER	Pemindai (Server)
ENCRPTION	Pengalihan kebentuk lain (enkripsi)
EPOS	Electronic Point of Sale
ERM	Electronic Record Management
ERP	Enterprise Resource Planning
ETHERNET	Spare Part untuk komunikasi komputer
EKSTRANET	Jaringan computer luar
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia Pasific (UN)

F

FAQ	Frequently Ask Questions
FIXED WIRELESS	Telepon tetap tanpa kabel
FILE	Himpunan record (computer)
FIBER OPTIC	Kabel yang dibuat dari serat optik
FIREWALL	Tembok/ Tabir pengaman (jaringan computer)
FRAME WORK	Kerangka kerja

FRAME RELAY	Sistem data komunikasi dimana data di bagi-bagi dalam bentuk frame
FRONT END	Tampilan muka (aplikasi)
FRONT-END	Tampilan akhir
FRONT OFFICE	Unit Layanan terdepan
FTTH	Fiber To Home
FTP	File Transfer Protocol/Protokolpertukaran file

G

GATEWAY	Pintu gerbang (informasi)
G2B	Government to Business
G2C	Government to Costomer
G2G	Government to Government
G3	Third Generation (teknologi ponsel) (Generasi ketiga)
GBE	Goverment Business Enterprise(BUMN/BUMD)
GBDe	Global Business Dialogue in Electronic
GIS	Sistem Informasi Geografis (peta)
GIGABIT	Sistem Komunikasi Komputer Kecepatan Tinggi
GPRS	General Packet Radio Service
GSMGlobal	System for Mobile Communications
GSI	Government Secure Intranet
GDMC	Government Data Management Center

H

HACKERS	Pemintas/pemenggal system operasi komputer
HANG	Penghentian alur system operasi (computer)
HIGWAY	Jalan Raya utama Informasi
HOMEPAGE	Halaman/Situs yg diakses di Internet
HOST	Induk (Jaringan komputer)
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol

HTTPS	HTTP Using a Secure Socket Layer (SSL)
HUB	Pembagi jalur komunikasi pada LAN
HYPERLINK	Sambungan langsung antar alamat situs

I

ICT	Information and Communication Technology
IDNIC	Indonesia Internet Domain Naming Authority
IED	Internet for Economoc Development
IITF	Indonesia IT Federation
IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter International)
INTERNET	Jaringan Informasi Global
INTRANET	Jaringan informasi dalam suatu gedung
INTEROPERABILITY	Kesamaan dalam pengoperasian
INTERCONEKSI	Ketersambungan dengan sistem lain
INTERFACE	Antar muka (Penindai) sistem
INTERNET TELEPHONY	Telepon melalui Internet
IP	Internet Protocol
ISDN	Integrated Service Digital Network
ISO	Internasional Standards Organization
ISP	Internet Service Provider
IT	Information Technology (Teknologi Informasi/TI)
ITU	International Telecommunication Union

J

JARINGAN	Jejaringan/hubungan antar komputer
JARINGAN LOKAL	Hubungan dalam satu area
JARINGAN METROPOLITAN	Hubungan dalam satu kota
JARINGAN LUAS	Hubungan dalam satu Negara

K

KSO	Kerjasama Operasi
KTIN	Kerangka Teknologi Informasi Nasional

L

LAN	Lokal Area Network
LAYER	Lapisan (Jaringan komunikasi)
LINK	Lintasan Jaringan INformasi
LOGIN	Memulai Operasi (computer/aplikasi
LOOP	Lingkarannya Jaringan Tersambung

M

MAILING LIST	Daftar peserta surat menyurat elektronik
MAN	Metropolitan Area Network
MASTEL	Masyarakat Telematika Indonesia
MARKET PLACE	Pasar / Penyedia
MCT	Multi-purpose Community Telecenter
MIS	Management Information System (SIM)
MOBILE	Berpindah - pindah
META DATA	Data Dasar (Format)
MULTIMEDIA	Bentuk media yang mampu menggabungkan Layanan suara, gambar dan data

N

NCA	National Certification Authority
NCB	Nasional Computer Board (Singapura)
NETWORK	Jaringan
NITF	Nasional IT Framework
NMA	Nasional Monitoring Agency
NOS	Sistem Operasi (Jaringan)

O

OBI	Open Business over the Internet
OPEN SYSTEM	Sistim Terbuka
OPEN SOURCE	Sumber (kode) Terbuka/ Bebas
OS	Operating Sistem

P

PABX	Private Automatic Branch Exchange
PASSWORD	Kata Sandi
PDA	Personal Data Access
PDF	Printable Data Format (Jenis File)
PIN	Pusat Informasi Nasional
PKA	Public Key Authority
PKI	Public Key Infrastructure
PORTAL	Batas/ area/ Penanda
PLATFORM	Jaringan Dasar Komunikasi
PRIVACY	Hak
PROTOCOL	Penghubung/ Ketetapan/ Standar
PROXY	Pendekatan/ Terdekat(server)

R

RA	Registration Authority
REALTIME	Akses Informasi Langsung tanpa waktu tunda
REPEATER	Penguat/ Pengganda arus
REPLICATE	Pengganda
RING	Cincin (bentuk/ jenis jaringan)
RECOVERY	Pemulihan (data)
RING	Topologi Jaringan berbentuk cincin
ROM	Read Only Memory
ROUTER	Pengatur hubungan modem
REPLIKASI	Penggandaan

S

SET	Secure Electronic Transaction
SERVER	Penghimpun Layanan (computer)
SEARCH ENGINE	Mesin Pencari (Internet)
SERTIFIKASI	Pemberian Hak/Sertifikat/lulus uji
SKDP	Sistim Komunikasi Data Paket
SKKL	Sistim Komunikasi Kabel Laut
SKSO	Sistim Komunikasi Serat Optik
SSL	Secure Socket Layer
STAR	Topologi Jaringan berbentuk bintang
STORAGE	Tempat Menyimpan (informasi)
SUBSCRIBER	Pengguna (telekomunikasi)
SPAMMING	Mengirim email oleh seseorang ke sejumlah alamat email tanpa seijin dari pemilik alamat

T

TERMINAL	Pengujung Saluran (komunikasi)
TCP	Trasmission Control Protocol
TCP/IP	Trasmission Control Protocol/Internet Protocol
TELEMATIKA	Singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
TKTI	Team Koordinasi Telematika Indonesia
TUNNELING	Lorong (saluran) komunikasi
TOPOLOGI	Bentuk/Bagan (jaringan)

U

UNCITRAL	Inted Nations Commission on International Trade Law
UPS	Uninterruptable Power Supply
UPLOAD	Pengirim ke computer Host
URL	Uniform Resource Locator
USO	Universal Service Obligation

V

VSAT	Very Small Aperture Transmission (system satelit)
VIRTUAL	Maya / Semu
VPN	Virtual Private Network (Jaringan Komunikasi Terbatas/Khusus)
VOIP	Voice Over Internet Protocol (Protokol Komunikasi Suara lewat Saluran Internet)

W

WALL PAPER	Kertas / Gambar Latar Belakang
WAN	Wide Area Network/Jaringan Komputer Luas
WAP	Wairless Application Protocol/Protocol aplikasi Tampa kabel
WARNET	Warung Internet
WARTEL	Warung Telekomunikasi
WARSI	Warung Informasi
WARPOSTEL	Warung Pos dan Telekomunikasi
WARINTEK	Warung Internet
WDI	World Development Indicator
WIRELESS	Nirkabel / tanpa kabel
WEB	Situs Informasi di Internet
WI-PI	Wireless Internet Technology
WIPO	World Intellectual Property Organization
WWW	World Wide Wed

X

XML	Extensible Mark Up Language
-----	-----------------------------

Y

YAHOO	Situs Umum di Internet Paling Terkenal
-------	--

TASK FORCE
PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT

PENGARAH

J.B. Kristiadi, Aizirman Djusan, Setyanto P. Santosa,
Daeng M. Nazier, Rsy. Kusumastuti, Roem Lintang,
Djamhari Sirat, Prapto Hadi, Sumarwoto, Jonathan L. Parapak,
E. C.W. Nelloe, Rudjito, Iskandar Alisyahbana,
M. Nazif, Hari Kartana.

PELAKSANA

Moedjiono, Ashwin Sasongko. S, Cahyana Ahmadjadi,
Iman Sudarwo, Richard Mengko, Djoko Agung.H,
Hadwi Soendjojo, Suhono Harso.H, Yappi Manafe, Albert Batti,
Akmam Amir, Natsir Amal, Udi Rusadi, Lolly Amalia.A, Mas
Wigrantoro, Rudi Salahudin, Rusdianto, M. Arsyad Ismael,
Gunawan Rianto, Teddy Sukardi, Tulus Rahardjo, Ameriana
Hadju, Muljana Sukarni, Alfian Noer, Roosmariharso,
Mudjiono, Edo Gandamana, , Hilman MS, Panji Choesin,
Alexander Rusli, Kristiono, Heru Nugroho, John Welly, Guntur
Siregar, Moyong, , St. J. Alam Rangkuti, IGP Suryawirawan,
Indra Setiawan, Sulisty, Lilik Gani.

PENYUNTING

Yudi Kusmayadi, M. Yamin Bustomi, Boni Pudjianto,
Basori HS, Septriana Tangkary, Lukman